

Peningkatan Kualitas Hidup Penyandang Disabilitas melalui Program Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan Sosial

Nisaul Hasanah¹, Meta Silfia Novembli², Sri Wahyuni³, Dina Fitriani⁴, Peby Tri Hartati³

Universitas Lancang Kuning

Nisaul70@unilak.ac.id, metasilfia_N@unilak.ac.id, sriwahyuni91@unilak.ac.id,
dina@unilak.ac.id, pebytrihartati@unilak.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isu disabilitas melalui pendekatan edukasi partisipatif. Program dilaksanakan di Kota Pekanbaru, yang ditandai dengan minimnya pemahaman warga tentang hak dan interaksi yang tepat dengan penyandang disabilitas. Menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), kegiatan meliputi pelatihan, simulasi empati, dan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan (dari 38% menjadi 87%) dan sikap positif terhadap penyandang disabilitas (dari 42% menjadi 90%). Selain itu, warga mulai melakukan tindakan nyata seperti perbaikan aksesibilitas dan perubahan norma sosial dalam penggunaan istilah yang lebih inklusif. Program ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis pengalaman dan keterlibatan langsung efektif dalam membentuk budaya masyarakat yang lebih empatik dan inklusif. Kegiatan ini diharapkan dapat direplikasi di komunitas lain sebagai model pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

Keywords: *disabilitas, edukasi partisipatif, inklusi sosial, simulasi empati, pemberdayaan masyarakat.*

Pendahuluan

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak, kewajiban, dan potensi yang setara dengan warga negara lainnya. Namun demikian, diskriminasi, stigma, dan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta partisipasi sosial masih menjadi realitas yang dihadapi oleh kelompok ini di Indonesia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 telah menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara adil dan bermartabat (Kementerian Hukum dan HAM, 2016). Meski regulasi telah ada, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat masyarakat dan kelembagaan. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep disabilitas dan inklusi sosial (Mumpuniarti, 2018). Persepsi yang keliru, seperti anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja atau

berkontribusi, memperkuat marginalisasi terhadap mereka. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat menjadi aspek krusial dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif.

Konsep disabilitas sendiri telah bergeser dari pendekatan medis ke pendekatan sosial, yang menempatkan hambatan bukan pada individu penyandang disabilitas, melainkan pada lingkungan yang tidak inklusif (WHO, 2011). Dalam pendekatan sosial, ketidakmampuan muncul bukan dari keterbatasan fisik atau mental semata, melainkan dari kegagalan sistem sosial dalam mengakomodasi keberagaman (Oliver, 1996). Masyarakat yang tidak memahami prinsip ini cenderung menciptakan ruang publik dan kebijakan yang eksklusif, memperkuat hambatan partisipatif bagi penyandang disabilitas. Padahal, inklusi sosial merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan (UNESCO, 2020). Melalui pendekatan inklusif, masyarakat diajak untuk melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai beban. Ketika nilai inklusivitas menjadi bagian dari budaya kolektif, maka transformasi sosial dapat tercapai secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan literasi sosial terkait disabilitas harus menjadi agenda prioritas dalam pembangunan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu cara efektif dalam mendekatkan isu-isu disabilitas kepada masyarakat umum. Melalui program-program edukatif dan partisipatif, masyarakat dapat memperoleh pemahaman baru tentang cara berinteraksi yang ramah, inklusif, dan menghargai martabat penyandang disabilitas (Yuniarti et al., 2020). Proses edukasi ini tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan sikap dan perilaku. Dalam konteks ini, simulasi empati dan pelatihan interaktif telah terbukti lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan ceramah konvensional (Rachmawati & Nugraheni, 2019). Kegiatan pengabdian juga dapat menjadi ruang dialog antara penyandang disabilitas dan masyarakat, sehingga terjadi pertukaran pengalaman yang mendalam. Pengalaman langsung berinteraksi dengan penyandang disabilitas dapat membongkar stereotip dan memperkuat rasa empati serta solidaritas sosial. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga transformatif.

Masih banyak wilayah di Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah wilayah RW 05 Kelurahan Sukamaju, tempat dilaksanakannya program ini, di mana terdapat penyandang disabilitas namun belum tersedia sarana dan interaksi sosial yang mendukung keberadaan mereka. Berdasarkan survei awal yang dilakukan, sebagian besar warga belum memahami perbedaan jenis disabilitas, hak dasar mereka, dan cara berinteraksi yang tepat (Kustanti & Sari, 2020). Ketidaktahuan ini bukan disebabkan oleh keengganan, melainkan minimnya akses terhadap informasi dan pelatihan. Banyak warga yang mengaku tidak pernah mendapatkan informasi langsung dari sumber terpercaya mengenai isu disabilitas. Di sisi lain, terdapat potensi besar dari komunitas lokal untuk menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan inklusif. Dengan

pendekatan yang tepat, komunitas ini dapat diberdayakan untuk menjadi pelopor inklusi sosial berbasis komunitas.

Partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan program edukasi inklusivitas. Ketika masyarakat dilibatkan dalam proses pembelajaran, mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga pelaku perubahan sosial. Metode partisipatif seperti Participatory Rural Appraisal (PRA) menjadi pendekatan yang tepat untuk mendorong keterlibatan warga secara aktif (Chambers, 1994). PRA memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan mencari solusi bersama, sehingga muncul rasa memiliki terhadap program yang dijalankan. Pendekatan ini juga mendorong keberlanjutan, karena transformasi tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari dalam komunitas. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan inklusif yang menekankan partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk kelompok marginal. Dalam konteks disabilitas, hal ini berarti melibatkan penyandang disabilitas secara langsung dalam proses edukasi dan perencanaan program.

Perubahan sikap terhadap disabilitas tidak dapat terjadi secara instan. Ia memerlukan proses yang berkelanjutan melalui pendekatan yang sistematis dan konsisten. Edukasi berbasis pengalaman, yang menggabungkan aspek kognitif dan afektif, terbukti lebih efektif dalam membentuk pemahaman dan empati (Nugroho et al., 2021). Selain edukasi, penting pula untuk menciptakan ruang-ruang publik yang ramah disabilitas, sebagai bentuk konkret dari praktik inklusi. Ketika masyarakat melihat bahwa penyandang disabilitas mampu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, maka akan terjadi pergeseran paradigma secara alami. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak dapat berhenti pada satu kali pelatihan, tetapi harus menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas. Hal ini mencakup kolaborasi dengan sekolah, organisasi lokal, dan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan masyarakat. Transformasi ini akan menciptakan ekosistem sosial yang menghargai setiap individu tanpa terkecuali.

Melalui dasar pemikiran tersebut, maka dirancanglah program pengabdian kepada masyarakat di wilayah RW 05 Kelurahan Sukamaju, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang inklusi disabilitas. Kegiatan ini berfokus pada edukasi partisipatif, pelatihan empati, serta simulasi interaktif guna menciptakan pemahaman yang menyeluruh dan membumi. Selain itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk mendorong masyarakat mengambil peran aktif dalam menciptakan ruang sosial yang ramah disabilitas. Tujuan akhirnya adalah membangun komunitas yang sadar, peduli, dan siap menjadi bagian dari gerakan sosial inklusif. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan budaya dalam masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat, menjadi kunci dalam keberhasilan program ini. Dengan kolaborasi yang kuat dan visi yang jelas, masyarakat inklusif bukan lagi utopia, melainkan keniscayaan yang bisa diwujudkan bersama.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan model Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan masyarakat menjadi subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Tahapan awal dimulai dengan pemetaan sosial di Kota Pekanbaru untuk mengidentifikasi kondisi sosial, persepsi masyarakat terhadap disabilitas, serta potensi lokal yang dapat dikembangkan. Teknik yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan forum diskusi kelompok terarah (FGD). Selain itu, dilakukan pendekatan informal kepada tokoh masyarakat dan keluarga penyandang disabilitas untuk memperoleh data yang lebih kaya secara kualitatif. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif antara tim akademisi, mahasiswa, dan mitra lokal. Prinsip dasar metode ini adalah membangun kesadaran kritis dan pemberdayaan masyarakat melalui proses yang inklusif dan reflektif.

Setelah tahap pemetaan, dilaksanakan rangkaian kegiatan edukatif berupa pelatihan, simulasi, dan diskusi interaktif yang bertujuan membentuk pemahaman baru tentang konsep disabilitas dan inklusi. Pelatihan meliputi materi pengenalan jenis-jenis disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, serta cara berinteraksi yang inklusif dan empatik. Kegiatan ini disampaikan menggunakan media visual, video pendek, dan permainan edukatif untuk memudahkan pemahaman masyarakat lintas usia. Simulasi empati dilakukan dengan metode *role-play*, di mana peserta mencoba merasakan pengalaman penyandang disabilitas dalam aktivitas sehari-hari. Diskusi kelompok digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman peserta, serta merumuskan solusi lokal atas hambatan inklusi yang mereka hadapi. Kegiatan dilaksanakan di balai warga dan fasilitas umum lainnya dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk remaja, ibu rumah tangga, dan tokoh masyarakat. Seluruh proses didokumentasikan untuk keperluan evaluasi dan pengembangan program lanjutan.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara formatif dan sumatif untuk mengukur efektivitas program serta perubahan pengetahuan dan sikap masyarakat. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pelatihan melalui observasi dan umpan balik lisan dari peserta. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan di akhir kegiatan melalui kuisioner dan wawancara terbuka untuk mengetahui dampak program terhadap pemahaman dan sikap inklusif warga. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menangkap nuansa perubahan perilaku dan perspektif. Selain itu, dilakukan perbandingan hasil pre-test dan post-test sederhana untuk melihat peningkatan pengetahuan peserta. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi program lanjutan serta perbaikan metode pelaksanaan. Dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya membangun masyarakat yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Hasil

Program edukasi inklusi disabilitas yang dilaksanakan di RW 05 Kelurahan Sukamaju menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test sederhana yang dilakukan terhadap 40 peserta, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep disabilitas. Sebelum kegiatan, hanya 38% peserta yang memahami perbedaan antara disabilitas fisik, intelektual, dan sensorik. Setelah kegiatan, angka ini meningkat menjadi 87%. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pendekatan interaktif seperti simulasi empati dan video edukatif. Peserta mengaku lebih mudah memahami materi karena pendekatannya aplikatif dan menyentuh sisi emosional mereka. Ini menunjukkan bahwa metode partisipatif dapat meningkatkan efektivitas program edukasi sosial.

Tidak hanya pengetahuan, sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas juga menunjukkan perubahan positif. Sebelum kegiatan, hanya 42% responden menyatakan bersedia berinteraksi atau bekerja sama dengan penyandang disabilitas. Setelah kegiatan, angka tersebut melonjak menjadi 90%. Peningkatan ini dipicu oleh adanya sesi simulasi dan diskusi terbuka yang membongkar stereotip negatif yang selama ini melekat. Peserta menyadari bahwa keterbatasan fisik bukan hambatan untuk berkontribusi secara sosial. Dalam diskusi, beberapa warga bahkan mengusulkan inisiatif untuk membentuk kelompok relawan disabilitas. Ini menandakan tumbuhnya kesadaran kolektif dan kepedulian sosial yang lebih tinggi dalam komunitas.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, terjadi peningkatan partisipasi aktif warga dalam menciptakan lingkungan yang lebih ramah disabilitas. Misalnya, beberapa warga secara sukarela membantu memodifikasi akses jalan menuju balai warga agar bisa dilalui kursi roda. Selain itu, muncul pula kesadaran kolektif untuk memperhatikan tata letak furnitur di ruang publik agar tidak menghalangi mobilitas penyandang disabilitas. Perubahan ini menunjukkan bahwa edukasi tidak hanya memengaruhi pemahaman, tetapi juga mendorong tindakan nyata di tingkat komunitas. Partisipasi aktif ini menjadi indikator penting keberhasilan pendekatan partisipatif dalam program pengabdian. Warga mulai melihat penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadi fondasi bagi terbentuknya budaya inklusif secara berkelanjutan.

Hasil diskusi kelompok menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan komunitas mereka. Mereka mengapresiasi pendekatan non-menggurui dan partisipatif yang diterapkan selama program berlangsung. Bahkan, beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka baru pertama kali mendapatkan informasi langsung tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Kegiatan ini juga membuka ruang refleksi kritis terhadap praktik diskriminatif yang sebelumnya dianggap lumrah. Misalnya, istilah-istilah yang merendahkan penyandang disabilitas mulai ditinggalkan dan digantikan dengan istilah yang lebih humanis. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya mengedukasi,

tetapi juga membentuk ulang norma sosial yang lebih inklusif. Antusiasme warga menjadi modal penting untuk pengembangan program lanjutan yang lebih berkelanjutan.

Secara umum, program pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan literasi sosial masyarakat terhadap isu disabilitas. Keberhasilan ini diperkuat oleh hasil evaluasi sumatif yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan nyata warga. Diagram di bawah ini menggambarkan perbandingan persentase pemahaman dan sikap inklusif warga sebelum dan sesudah kegiatan. Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran sosial yang lebih inklusif dan empatik terhadap penyandang disabilitas.



Gambar 1. Perbandingan pemahaman dan sikap inklusif warga sebelum dan sesudah kegiatan.

Pembahasan

Program pengabdian masyarakat di RW 05 Kelurahan Sukamaju menunjukkan bahwa edukasi partisipatif memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isu disabilitas. Sebelum pelaksanaan program, hanya sebagian kecil warga yang memahami jenis-jenis disabilitas dan cara berinteraksi yang tepat (Kustanti & Sari, 2020). Setelah rangkaian kegiatan edukatif seperti pelatihan, diskusi interaktif, dan simulasi empati, pemahaman peserta meningkat secara signifikan. Data pre-test dan post-test menunjukkan bahwa pemahaman tentang perbedaan disabilitas fisik, intelektual, dan sensorik naik dari 38% menjadi 87%. Peningkatan ini membuktikan bahwa pendekatan berbasis pengalaman lebih efektif dibanding ceramah konvensional (Nugroho et al., 2021). Edukasi yang disampaikan dengan metode menyentuh sisi emosional peserta mampu menggugah kesadaran dan membentuk

empati sosial. Oleh karena itu, model pelatihan yang melibatkan partisipasi aktif warga perlu direplikasi dalam komunitas lain.

Perubahan sikap warga terhadap penyandang disabilitas juga sangat mencolok setelah kegiatan ini. Sebelumnya, hanya 42% warga menyatakan kesediaannya berinteraksi dengan penyandang disabilitas, namun angka ini meningkat menjadi 90% pascakegiatan (Yuniarti et al., 2020). Simulasi empati berperan besar dalam membongkar stereotip negatif yang selama ini tertanam. Aktivitas seperti role-play membuat peserta lebih memahami tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini memicu munculnya ide-ide inisiatif warga, seperti pembentukan kelompok relawan disabilitas. Menurut Oliver (1996), perubahan paradigma dalam masyarakat sangat mungkin terjadi jika hambatan sosial dikaji dan direspon secara partisipatif. Kegiatan ini berhasil membangun iklim sosial yang lebih terbuka dan menghargai perbedaan.

Program ini juga mendorong tindakan konkret di lapangan sebagai bentuk komitmen masyarakat terhadap inklusivitas. Beberapa warga berinisiatif memperbaiki akses jalan untuk kursi roda dan menata ulang furnitur di ruang publik agar ramah disabilitas. Hal ini sesuai dengan pendekatan Universal Design for Learning (UDL) yang menekankan pentingnya lingkungan yang adaptif dan mudah diakses semua pihak (CAST, 2018). Kesadaran akan pentingnya lingkungan fisik yang inklusif menjadi refleksi dari keberhasilan program edukasi yang tidak hanya berhenti pada ranah teoritis. UNESCO (2020) menekankan bahwa pembangunan inklusif tidak hanya soal kebijakan, tetapi juga perubahan praksis sosial di tingkat komunitas. Oleh karena itu, tindakan warga ini menunjukkan bahwa edukasi sosial yang tepat mampu menghasilkan perubahan perilaku nyata. Ini juga memperkuat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperluas dampak perubahan sosial.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman dan sikap, tetapi juga mengubah cara masyarakat memaknai interaksi sosial dengan penyandang disabilitas. Dalam forum diskusi, banyak warga menyampaikan bahwa mereka baru menyadari pentingnya penggunaan istilah yang ramah dan tidak mendiskriminatif. Istilah merendahkan seperti "cacat" diganti dengan penyebutan yang lebih manusiawi dan sesuai standar etika sosial (Rachmawati & Nugraheni, 2019). Hal ini memperlihatkan adanya pembentukan norma sosial baru dalam komunitas yang lebih sensitif terhadap isu inklusi. Pembentukan norma ini sangat penting dalam menciptakan keberlanjutan perubahan sosial. Ketika nilai inklusi tertanam dalam interaksi sehari-hari, maka masyarakat akan semakin terbiasa dan terbuka terhadap keberagaman. Dalam konteks ini, edukasi memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya sosial yang lebih adil dan setara.

Keberhasilan program ini tidak lepas dari penerapan metode Participatory Action Research (PAR), yang menjadikan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses perubahan. Melalui pendekatan ini, warga tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan, tetapi

jugadalam perencanaan dan evaluasi (Chambers, 1994). Keterlibatan langsung menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program, yang berdampak pada keberlanjutan hasil. Masyarakat belajar mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan menyusun solusi berbasis potensi lokal. Ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis komunitas, yang menekankan pemberdayaan dari dalam. World Health Organization (2011) menekankan bahwa pendekatan sosial terhadap disabilitas menuntut perubahan pada sistem, bukan hanya individu. Oleh karena itu, keterlibatan komunitas dalam program ini menjadi kunci utama dalam keberhasilan transformatif yang dicapai.

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa model edukasi partisipatif lebih efektif dibanding pendekatan tradisional yang bersifat top-down. Selain menggunakan kuisioner dan observasi, program ini juga mengandalkan wawancara mendalam untuk menangkap perubahan sikap yang tidak terlihat secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif ini penting untuk memahami nuansa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Nugroho et al., 2021). Analisis hasil menunjukkan bahwa warga menjadi lebih reflektif dan terbuka terhadap masukan baru. Edukasi yang menyentuh aspek emosional dan moral terbukti lebih membekas dibanding penyampaian informasi teknis semata. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi perancang program edukasi sosial lainnya. Evaluasi yang menyeluruh membantu dalam perbaikan berkelanjutan dan replikasi program di wilayah lain.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa inklusi disabilitas bukan hanya wacana, melainkan bisa diwujudkan melalui pendekatan yang sistematis dan kolaboratif. Literasi sosial yang meningkat menjadi bekal penting dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan mitra lokal memperkuat efektivitas dan dampak kegiatan. Hasil yang dicapai membuktikan bahwa perubahan sosial dapat dimulai dari skala komunitas kecil dengan pendekatan yang tepat. Program ini menjadi contoh bagaimana pengabdian kepada masyarakat mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik inklusi sosial. Ke depan, pendekatan ini perlu diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan dan pembangunan lokal. Dengan demikian, masyarakat inklusif bukan sekadar idealisme, tetapi realitas yang dapat dibangun bersama secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Program edukasi inklusivitas disabilitas yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Pendekatan partisipatif yang digunakan berhasil mendorong keterlibatan aktif warga dalam seluruh tahapan program. Simulasi empati, diskusi kelompok, dan pelatihan interaktif membentuk pemahaman yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek pengetahuan dan keterbukaan sikap masyarakat. Perubahan ini juga tercermin dalam tindakan konkret warga dalam menciptakan ruang yang ramah

disabilitas. Selain meningkatkan literasi sosial, kegiatan ini juga memfasilitasi terbentuknya norma baru yang lebih inklusif dan empatik. Oleh karena itu, program ini dapat dijadikan model intervensi sosial untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa.

Agar dampak positif dari program ini berkelanjutan, perlu dilakukan replikasi dan perluasan kegiatan serupa di wilayah lain melalui dukungan lintas sektor. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil disarankan untuk mengadopsi pendekatan partisipatif dalam kegiatan edukasi sosial. Selain itu, diperlukan integrasi isu disabilitas dalam kurikulum sekolah dan pelatihan kader masyarakat agar literasi inklusi semakin meluas. Akses terhadap informasi yang benar tentang disabilitas harus ditingkatkan melalui media lokal dan kampanye publik. Penyediaan infrastruktur fisik yang ramah disabilitas juga menjadi aspek penting dalam mendukung perubahan sosial. Untuk keberlanjutan program, pendampingan komunitas secara berkala dan pelibatan penyandang disabilitas sebagai fasilitator sangat direkomendasikan. Dengan strategi tersebut, masyarakat inklusif dapat terwujud sebagai bagian dari pembangunan sosial yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Ainsworth, P., & de Guzman, J. (2021). *Community-based interventions for disability inclusion: A global perspective*. Routledge.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik penyandang disabilitas di Indonesia 2021. <https://www.bps.go.id/publication>
- Bappenas. (2023). Laporan pembangunan inklusif disabilitas 2023. Kementerian PPN/Bappenas.
- Dewi, S. K., & Pratama, A. (2022). "Peningkatan empati masyarakat melalui pelatihan interaksi ramah disabilitas". *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), 45–60. <https://doi.org/xxxx>
- Firdaus, M. (2021). "Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa inklusif". *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 8(1), 22–35.
- International Labour Organization (ILO). (2023). *Disability inclusion in the workplace: Evidence from Southeast Asia*. <https://www.ilo.org/disability>
- Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). (2022). Panduan desa inklusif. <https://kemendesa.go.id>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). (2022). Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kustanti, E., & Sari, D. P. (2020). "Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas: Tantangan dan solusi". *Jurnal Hukum Keadilan*, 12(3), 112–130.
- Mumpuniarti. (2018). *Stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia*. UGM Press.
- Nugroho, A. (2021). "Peran tokoh agama dalam promosi inklusi disabilitas". *Jurnal Studi Sosial*, 5(2), 78–92.
- Purwanto, E. (2021). "Diskriminasi pekerja disabilitas di sektor formal". *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(1), 33–50.

- Setiawan, D., et al. (2022). "Edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma disabilitas". *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 89–104.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2024). Inclusive development strategies for local governments. <https://www.undp.org>
- World Health Organization (WHO). (2023). Global report on disability-inclusive development. <https://www.who.int/disabilities>